

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, KAMIS 22 JUNI 2023

RINGKASAN BERITA HARI INI

Dewan Pinta Pemkab Terbitkan Rentenir Berkedok Koperasi

Sidoarjo, Memorandum Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Didi Prasetyo meminta Pemkab Sidoarjo melalui dinas koperasi usaha kecil dan menengah (USKM) untuk menertibkan dan membangun Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat.

Menurut Didi, aktivitas Rentenir Berkedok Koperasi di lingkungan masyarakat akan merugikan masyarakat. Sebab mereka mengambil keuntungan yang berlebihan dan menyebarkan pengaruh negatif di lingkungan masyarakat.

"Maka itu kami meminta Pemkab Sidoarjo untuk menertibkan Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat. Kami meminta dinas koperasi usaha kecil dan menengah (USKM) untuk menertibkan dan membangun Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat."

Komisari A Siapkan Dua Skema Atasi Kelangkaan Blangko E-KTP

KOTA-Keprihatinan terhadap kelangkaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang telah berlangsung selama beberapa bulan belakangan legislatif untuk mengambil tindakan serius.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chaudhry, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera."

Gandeng JTI, Sattantas Polresta Sidoarjo Ikuti Pelatihan Jurnalistik

Sidoarjo, Memorandum Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Didi Prasetyo meminta Pemkab Sidoarjo melalui dinas koperasi usaha kecil dan menengah (USKM) untuk menertibkan dan membangun Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat.

Menurut Didi, aktivitas Rentenir Berkedok Koperasi di lingkungan masyarakat akan merugikan masyarakat. Sebab mereka mengambil keuntungan yang berlebihan dan menyebarkan pengaruh negatif di lingkungan masyarakat.

"Maka itu kami meminta Pemkab Sidoarjo untuk menertibkan Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat. Kami meminta dinas koperasi usaha kecil dan menengah (USKM) untuk menertibkan dan membangun Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat."



LANKA: Blangko e-KTP di Sidoarjo untuk sementara belum tersedia.

KOTA-Keprihatinan terhadap kelangkaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang telah berlangsung selama beberapa bulan belakangan legislatif untuk mengambil tindakan serius.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chaudhry, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera."



LANKA: Latihan dibarengi dengan diskusi dan sesi tanya-jawab dengan narasumber.

KOTA-Promo perayaan Prastawa, Sastra, dan Budaya (PSB) yang telah berlangsung selama beberapa bulan belakangan legislatif untuk mengambil tindakan serius.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chaudhry, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera."

Blangko Terbatas, Antrean Cetak E-KTP Tembus 13.800 Pemohon

Sidoarjo - Sejak Mei lalu, blangko e-KTP terbatas. Akibatnya, antrean cetak e-KTP terus bertambah. Hingga kini, antrean cetak e-KTP telah mencapai 13.800 pemohon.

Ketua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo, Didi Prasetyo, mengatakan bahwa blangko e-KTP terbatas karena masalah teknis di tingkat pusat.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk mempercepat proses cetak e-KTP. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk mempercepat proses cetak e-KTP."

Ning Sasha Ajak Remaja Ikut Turunkan Stunting lewat Media Digital

Sidoarjo - Ning Sasha mengajak remaja untuk ikut turunkan stunting lewat media digital. Ia mengajak remaja untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang stunting.

"Kami mengajak remaja untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang stunting. Kami juga mengajak remaja untuk menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang stunting."

Perlu Antisipasi Dampak Kemarau pada Sektor Pertanian

KOTA-Masyarakat harus memperhatikan dampak kemarau pada sektor pertanian. Pemerintah harus melakukan antisipasi dampak kemarau pada sektor pertanian.

"Kami mengajak masyarakat untuk memperhatikan dampak kemarau pada sektor pertanian. Kami juga mengajak masyarakat untuk memperhatikan dampak kemarau pada sektor pertanian."

Waspada, Katarak Sebabkan Kebutaan Terbesar di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa Penanggung jawab Klinik Mata KMU Sidoarjo, Dr. Miftah Rochmah, SpM, mohon kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo bisa waspada dengan penyakit mata katarak. Sebab, penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan terbesar yang harus diwaspadai.

"Di Kabupaten Sidoarjo, penyakit mata katarak merupakan penyebab kebutaan terbesar yang harus diwaspadai." jelas Dr. Miftah, Senin (20/6) kemarin.

Dirinya sempat menyampaikan kalau Bulan Juni adalah bulan yang diperingat sebagai bulan kesadaran ungu tentang Awareness Month. Menurutnya ini bisa dijadikan sebagai suatu momen yang tepat dalam mewujudkan misi pemberantasan kebutaan.

"Instansi ini harus digalakan, karena fakta, bahwa penyakit katarak ini sungguh mengancam dan membutuhkan penanganan yang tepat." kata salah satu dokter mata yang bertugas di RSUD Sidoarjo ini.

Dirinya menyampaikan di Klinik Mata KMU Sidoarjo, paripetugas kesehatan beserta dokter spesialis mata memberikan edukasi tentang katarak kepada masyarakat. Termasuk melakukan cek gula darah acak (GDA) dan skrining katarak.

Tidak hanya masyarakat Sidoarjo, tapi juga seluruh masyarakat di dunia, ia berharap bisa lebih peduli dengan katarak. Katarak ini adalah kasus yang paling banyak menyebabkan kebutaan di dunia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

"Dari catatannya, pada tahun 2022 lalu, tercatat 822 kasus katarak di KMU Sidoarjo, dan hingga 2023 ini sudah ada 31 orang menderitanya katarak."

Di tingkat nasional, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 lalu, penyebab kebutaan terbesar di Indonesia adalah katarak. Sebesar 34,47% penderita katarak mengalami kebutaan, kemudian disusul oleh Glaukoma.

"Di KMU Sidoarjo, pasien terbanyak yang kami layani memang pasien katarak," katanya. [kus-gat]

PARPOL PERTANYAKAN PENCAIRAN BANPOL JELANG PEMILU 2024

Sidoarjo, Pejok Kiri Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, partai politik (parpol) di Kabupaten Sidoarjo mempertanyakan Dana Bantuan untuk Partai Politik (Banpol) yang harus diwujudkan. Mereka meminta Pemkab Sidoarjo untuk menertibkan dan membangun Rentenir Berkedok Koperasi yang selama ini dikekalkan masyarakat.

"Kami mempertanyakan Dana Bantuan untuk Partai Politik (Banpol) yang harus diwujudkan. Kami juga mempertanyakan Dana Bantuan untuk Partai Politik (Banpol) yang harus diwujudkan."

KPPN Gelar Mini Expo

Sidoarjo - KPPN menggelar Mini Expo di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UMKM.

"Kami menggelar Mini Expo di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UMKM."

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Komisi A Siapkan Dua Skema Atasi Kelangkaan Blangko E-KTP



LANGKA: Blangko e-KTP di Sidoarjo untuk sementara belum tersedia.

KOTA-Keprihatinan terhadap kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP yang telah berlangsung selama beberapa bulan kalangan legislatif untuk mengambil tindakan serius.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Dis-

pendukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk mencari solusi terbaik terkait kelangkaan blangko e-KTP," ujar politikus PKB itu.

Da menjelaskan, ada dua skema yang dirumuskan untuk mengatasi kekurangan blangko e-KTP. Yakni mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mencari dana hibah.

Dhamroni menilai, memberikan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Kemendagri adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar un-

dang-undang. "Komisi A dan Dispendukcapil akan mengajukan permohonan ke Kemendagri terkait kelangkaan blangko e-KTP di Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.

Jika permohonan untuk blangko e-KTP tidak disetujui, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mempersiapkan dana hibah sebesar Rp 712 juta untuk membeli 70 ribu keping e-KTP. Dengan anggaran sekitar Rp 10.182 per keping.

Dhamroni menyebut, dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,

● Ke Halaman 10



Komisi A Siapkan...

penanganan kekosongan blangko e-KTP di Kabupaten Sidoarjo harus segera dilakukan. Sebab hal tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi warga saat akan menggunakan hak pilih mereka nanti.

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar pemilih pemula dan mereka yang perlu mengganti e-KTP karena kerusakan dapat

menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu nanti," tegasnya.

Hingga bulan ini ada sekitar 13 ribu warga terpaksa masuk daftar tunggu karena kekurangan blangko e-KTP di Dispendukcapil.

Sementara itu, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo hanya menerima sekitar 2 ribu blangko dari Kemendagri, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian pencetakan ribuan e-KTP. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Pinta Pemkab Tertibkan Rentenir Berkedok Koperasi

Sidoarjo, Memorandum

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Didik Prasetyo meminta Pemkab Sidoarjo melalui dinas koperasi usaha kecil dan menengah (diskop UKM) untuk menertibkan, dan memberangus rentenir berkedok koperasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Menurut Didik, aktivitas rentenir berkedok koperasi selama ini sangat memberatkan masyarakat. Sebab mereka mengambil keuntungan

yang berlebihan dan menyebabkan masyarakat semakin terpuruk di tengah ekonomi yang serba sulit.

"Maka itu kami meminta

action dari instansi terkait untuk memberangus keberadaan rentenir yang kebanyakan mengatasnamakan koperasi ini," tegasnya.

Kalaupun ada koperasi yang kegiatan usahanya mengarah pada simpan pinjam, namun imbuhan Didik, kegiatannya tidak beraskan kesejahteraan anggotanya, maka koperasi tersebut keberadaannya harus ditinjau ulang.

Terutama perizinan pendiriannya. Terlebih koperasi itu didirikan tidak lain sebagai wadah untuk membangun usaha masyarakat (anggotanya) untuk lebih baik, terutama dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan.

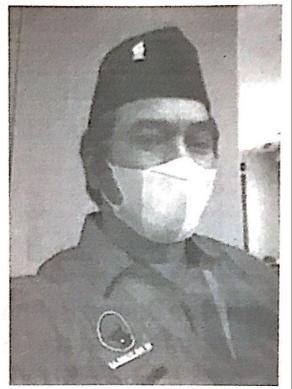
"Seharusnya membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, bukan membuat anggotanya menjadi terpuruk

dan kian tercekik. Maka itu kita minta dinas terkait harus memperhatikan hal ini," tuturnya.

Sehubungan dengan maraknya rentenir berkedok koperasi ini membuat geram anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI-P itu, sehingga meminta Bupati Sidoarjo harus menindak tegas koperasi tersebut.

"Saya mengharapkan

orang nomor satu di Sidoarjo menugaskan diskop UKM untuk menginventarisir koperasi yang ada dengan sasaran kegiatan usaha yang dijalankan. Yakni melakukan penyisiran dan menginventarisir koperasi mana saja yang benar-benar menjalankan fungsi koperasi dan mana saja yang melanggar ketentuan dalam perkoperasian," tutup Didik. (yud/jok/nov)



Anggota DPRD Sidoarjo Didik Prasetyo

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Blangko Terbatas, Antrean Cetak E-KTP Tembus 13.800 Pemohon

Hanya 2.000 Lembar Setiap Minggu

SIDOARJO - Sejak Mei lalu, blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Sidoarjo terbatas. Sebab, ada batasan alokasi blangko dari pemerintah pusat. Imbasnya, saat ini ada 13.800 warga yang antre cetak e-KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, blangko e-KTP di Sidoarjo bukan habis. "Ada, tapi terbatas. Kami prioritaskan untuk masyarakat penyandang disabilitas, ODGJ lansia, pemilih pemula, dan masyarakat yang membutuhkan mendesak," katanya. Warga yang masuk kategori pemilih pemula didahulukan agar e-KTP bisa digunakan pada Pemilu 2024. Untuk masyarakat umum, antrean lebih lama. "Daftar tunggu sudah sekitar 13.800 orang," ujarnya. Tumpukan antrean tersebut terjadi



KEHABISAN BLANGKO: Petugas dispendukcapil melakukan proses perekaman data pembuatan e-KTP di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo kemarin (21/6).

sejak awal Mei lalu. "Sekarang seminggu hanya 2.000 blangko. Padahal, sehari bisa mencetak 400 e-KTP," katanya. Bahkan, jumlahnya bisa lebih, bergantung masyarakat yang datang untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP.

Karena keterbatasan blangko tersebut, pihaknya memusatkan pencetakan e-KTP di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. Di tiap kantor

kecamatan, untuk sementara pencetakan e-KTP belum bisa dilayani. "Setiap hari kami terus cetak di MPP sesuai urutan antrean," ujarnya.

Reddy mengatakan, biasanya keterbatasan blangko terjadi pada akhir tahun. Namun, kali ini di pertengahan tahun blangko sudah terbatas. Pihaknya terus mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) agar ada tambahan blangko di Sidoarjo.

"Kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Sidoarjo, tapi hampir di semua daerah. Di Jember, antrean sampai 25 ribu," katanya. Meskipun ada keterbatasan, perekaman e-KTP tetap bisa dilakukan. Warga yang menjalani perekaman sekaligus didaftarkan identitas kependudukan digital (IKD). "Aktivasi IKD terus kami genjot. Sekarang sudah sekitar 30 ribu orang yang aktivasi," terangnya. Selain itu, pihaknya memberikan biodata penduduk WNI dalam bentuk digital kepada warga yang masih antre e-KTP. Biodata tersebut berisi data yang sama dengan KTP. Dengan begitu, warga tetap memiliki identitas meskipun digital. Memang, tidak semua instansi menerima IKD.

"Kami mohon maaf dan harapannya warga bisa bersabar. Sementara, kami melakukan aktivasi IKD dan cetak biodata," tuturnya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

BPJS Kesehatan Sidoarjo Ajak Peserta Manfaatkan Aplikasi Mobile JKN Tawarkan Berbagai Kemudahan Layanan

Sidoarjo, Memo X

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo menggelar acara gathering bersama puluhan kru media Sidoarjo, Selasa (20/06/2023). Dalam media gathering yang dikemas dengan Temu Peserta Program JKN, Sinergi Program JKN Bersama Komunitas ini membahas soal Aplikasi Mobile JKN. Apalagi, dalam aplikasi itu juga disediakan berbagai layanan yang memudahkan peserta JKN.

Dalam acara itu, terdapat dua narasumber utama. Yakni Rini Purnawati Staf Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sidoarjo yang membahas pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN dan dr Nurul Hidayati yang membahas soal pola hidup sehat.

Saat ini, jaminan Mutu Layanan Kepesertaan menjadi kebutuhan penting saat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahkan, BPJS Kesehatan selalu terdepan memberikan ruang multi manfaat, edukasi, informasi dan kantong pengaduan melalui Aplikasi Mobile JKN itu.

Syaratnya, peserta JKN wajib mengunduh aplikasi melalui appstore atau playstore dalam platform android maupun IOS terlebih dahulu. Kemudian registrasi dan siapkan kartu peserta JKN atau KTP.

"Tapi jangan lupa, siapkan terlebih dahulu nomor Hand Phone



PAPARAN - Rini Purnawati Staf Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sidoarjo memberikan paparan soal Aplikasi Mobile JKN kepada puluhan kru media di ruang pertemuan lantai 4 Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, Selasa (20/06/2023).

(HP) dipastikan ada pulsanya. Karena saat registrasi nomor HP akan ada kode One Time Password (OTP) yang akan dikirim melalui layanan pesan singkat Short Message Service (SMS)," ujar salah seorang Staf Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sidoarjo,

Rini Purnawati di ruang pertemuan lantai 4 Kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, Selasa (20/06/2023). Lebih jauh, perempuan yang akrab disapa Rini ini menjelaskan Aplikasi Mobile JKN merupakan bentuk pengembangan yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Aplikasi pintar dalam genggamannya ini memiliki berbagai manfaat

dan kemudahan. Termasuk bisa membantu peserta JKN mendapatkan kemudahan mendaftar dan mengubah data kepesertaan.

"Untuk manfaat lain Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat menggali informasi data peserta dan keluarga, informasi tagihan dan pembayaran iuran serta mendapat pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan mudah menyampaikan pengaduan maupun permintaan informasi seputar program JKN - KIS," ungkap Rini.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi Publik, Dody Widodo menambahkan BPJS Kesehatan

Sidoarjo berupaya selalu update Transformasi Mutu Layanan. Bahkan BPJS Kesehatan Sidoarjo terus melakukan inovasi melalui edukasi kepada masyarakat perihal program JKN.

"Dengan transformasi mutu layanan masyarakat akan semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami terus berkeliling ke pelosok-pelosok di wilayah Sidoarjo melalui Mobile Customer Service (MCS). Kemudian informasi melalui pemberitaan diberbagai media," tegas pria yang akrab disapa Dody ini.

Selain itu, kata Dody, BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan terus berkolaborasi dalam memberi layanan terbaik kepada peserta JKN. Salah satunya dengan mendukung Janji Layanan JKN itu sendiri.

"Kami sajikan dengan cepat, mudah dan setara dalam setiap pelayanan. Pemantauan ini terus kami jalankan, seperti daftar berobat cukup dengan KTP, tanpa foto copy berkas dan paling penting tidak ada tambahan biaya diluar ketentuan serta melakukan pengawasan pembatasan hari rawat pasien," paparnya.

Dody juga mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder terkait yang ikut kepesertaan program JKN sekaligus memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN. (par/wan)

MEMO X



WASPADA: Hamparan sawah di Desa Sidodadi, Kecamatan Candi yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau.

Perlu Antisipasi Dampak Kemarau pada Sektor Pertanian

KOTA-Musim kemarau diprediksi akan memberikan dampak kekeringan di beberapa sektor. Salah satunya sektor pertanian. Untuk itu, Komisi B DPRD Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait untuk segera mengambil tindakan antisipatif.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pudjianto mengatakan, selain mengantisipasi kebakaran lahan, pemerintah juga harus mem-

perhatikan nasib petani yang mengalami penurunan produksi akibat musim kemarau. Legislator Gerindra menilai pemkab harus segera serius mengambil langkah-langkah antisipatif.

"Untuk mengatasi gangguan produksi pangan akibat kekeringan, yang berpotensi menyebabkan gagal panen," katanya.

Dia menyebutkan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh

Pemkab Sidoarjo dalam menghadapi kekeringan. Seperti menyediakan sumur bor, memperbaiki saluran primer, skunder, dan tersier.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian utama. Sebab kondisi saluran air berdampak langsung pada kondisi air yang mengalir ke area pertanian masyarakat.

Bambang juga menekankan pentingnya mengambil langkah konkret untuk menghadapi musim

kemarau guna mencegah penurunan produksi pangan yang berimbas pada kenaikan harga komoditas.

Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, kekhawatiran juga timbul terkait ketersediaan pangan di pasaran dan lonjakan harga pangan jika terjadi gagal panen. (nis/vga)

Gandeng IJTI, Satlantas Polresta Sidoarjo Ikuti Pelatihan Jurnalistik

Sidoarjo, Memorandum
Puluhan anggota Satlantas Polresta Sidoarjo menerima materi pembekalan tentang jurnalistik. Tujuannya untuk memberikan tambahan informasi serta bisa menjadi referensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kegiatan pembekalan ini dilaksanakan di ruang Parahita Raksaka satlantas polresta, Jalan Raya Cemengkalan Sidoarjo, Rabu (21/6). Dibuka langsung Kasatlantas Kompol Yanto Mulyanto dan dihadiri Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sidoarjo Pramono Putra.

Menggandeng IJTI Korda Sidoarjo, puluhan anggota satlantas mendapat materi terkait pembuatan berita video serta beberapa hal terkait masalah kehumasan.

Sebagai pemateri, Ketua IJTI Sidoarjo yang juga jurnalis iNews/MNC Media Group Pramono Putra berharap pelatihan itu bisa menambah wawasan kehumasan bagi anggota Satlantas Polresta Sidoarjo.

"Semoga dengan kerja sama yang dilakukan Satlantas

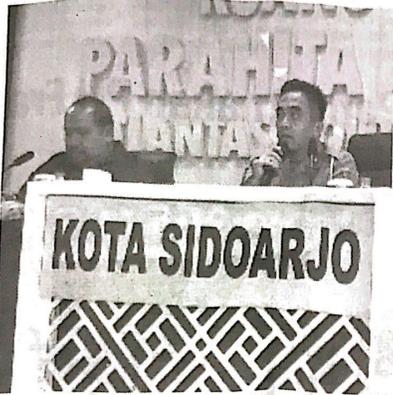
Polresta Sidoarjo dengan IJTI, bisa menambah pengetahuan dan wawasan terkait masalah kehumasan dan pembuatan narasi berita serta video sesuai standar *broadcasting* Indonesia," ujar Pramono.

Sementara itu, kasatlantas mengatakan bahwa kegiatan pelatihan pembekalan jurnalistik dengan puluhan anggota ini dinilai sangat bermanfaat. Pihaknya mengapresiasi IJTI Korda Sidoarjo yang memberikan pembekalan materi tentang jurnalistik.

"Kegiatan ini benar-benar sangat bermanfaat untuk anggota. Dengan harapan ke depannya setiap personel cepat memberikan laporan adanya peristiwa kecelakaan," harapnya.

Kasatlantas menambahkan karena pengambilan foto dan video tersebut harus ada tekniknya agar hasil dari pengambilan tersebut mudah dimengerti anggota yang lain. Selain itu agar memahami cara membuat laporan ke atasannya.

"Pembekalan materi jurnalistik ini sangat dibutuhkan



Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo mengikuti pelatihan pembekalan kehumasan dan jurnalistik di ruang Parahita Raksaka.



anggota. Selain itu kami memberikan apresiasi kepada anggota IJTI Korda Sidoarjo yang peduli dengan sumbangsih yang memberikan materi ini," imbuh Yanto.

Sementara itu, seorang

anggota satlantas yakni Moh Amin Jaffar mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua personel. Selama ini anggota satlantas baru kali pertama mendapat pelatihan pembekalan dan

pemahaman tentang jurnalistik.

"Kegiatan ini sangat membantu bagi personel, dengan kegiatan ini ke depannya ketika menemui kejadian kami siap memberikan laporan

dengan cepat," kata Amin.

Hal yang sama disampaikan Briptu Rahmawati Maghfiroh mengaku bahwa dengan kegiatan pembekalan materi jurnalistik ini sangat bermanfaat bagi anggota Sat-

lantas Polresta Sidoarjo.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anggota, karena selama ini kami belum memahami cara pengambilan foto dan video," tandas Rahma. (krl/jok/nov)

MEMORANDUM BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Ning Sasha Ajak Remaja Ikut Turunkan Stunting lewat Media Digital

SERAHKAN IADIAH - Ning Sasha saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba vlog video ke pemenang di acara sosialisasi kesehatan reproduksi remaja untuk mempercepat penurunan stunting di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (21/6).



SIDOARJO, SURYA - Selain mengajak semua anggota PKK, Ketua TP PKK Sidoarjo, Sa'adah Muhdlor juga mengajak para remaja untuk ikut andil dalam upaya penurunan stunting di Kota Delta.

Itu disampaikan di sela acara sosialisasi kesehatan reproduksi remaja untuk mempercepat penurunan stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (21/6).

Menurutnya, Sidoarjo terus berupaya menurunkan stunting. Selain lewat sosialisasi langsung, juga lewat media digital.

Beberapa waktu lalu, ia membuat lomba vlog kesehatan reproduksi remaja dalam upaya mempercepat penurunan stunting.

"Video vlog ini menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi mengenai upaya penurunan stunting," Ning Sasha,

panggilan istri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tersebut.

Ning Sasha mengatakan, video vlog seperti ini menjadi video edukatif bagi semua pihak. Khususnya bagi remaja. Video tersebut menurutnya sangat informatif. Pesan mencegah stunting mudah dipahami. Pesannya singkat nan padat dan jelas mengenai stunting.

"Video ini memberikan informasi secara umum hubungan antara kesehatan reproduksi remaja dengan upaya mencegah penurunan stunting," ujarnya.

Disebutnya bahwa remaja juga memiliki peran penting dalam upaya itu. Namun terlebih dahulu remaja harus memiliki informasi yang cukup mengenai stunting. Oleh karenanya salah satu tujuan lomba vlog kali ini adalah mengedukasi remaja tentang stunting.

"Mencegah stunting tidak

hanya bisa dipasrahkan kepada pemerintah saja, atau bahkan kepada ibu-ibu kader PKK, remaja juga dapat ikut andil mencegah stunting, jika kelak nanti menikah, anak-anak yang dilahirkannya nanti terhindar dari stunting," ucapnya.

Dalam lomba vlog kesehatan reproduksi remaja dalam upaya mempercepat penurunan stunting tersebut terdapat beberapa kriteria penilaian.

Diantaranya meliputi keorisinalan video yang dibuat, nilai edukasi dari vlog yang dibuat serta kesesuaian video dengan tema yang disampaikan. Selain itu teknik pengambilan gambar serta audio visual juga menjadi unsur penilaiannya.

Lomba tersebut diikuti oleh masyarakat umum. Tidak hanya diikuti oleh remaja sekolah namun juga TP. PKK desa dapat ikut serta. (krl)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PARPOL PERTANYAKAN PENCAIRAN BANPOL JELANG PEMILU 2024



Sidoarjo, Pojok Kiri

Menjelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang, partai politik (parpol) di Kabupaten Sidoarjo mempertanyakan Dana Bantuan untuk Partai Politik (Banpol) yang hingga saat ini belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo, Sumi Harsono saat dikonfirmasi jurnalis membenarkan bahwa dana Banpol dari Pemkab Sidoarjo memang belum cair.

"Iya Banpol belum turun, belum dicairkan," kata Sumi.

Meskipun belum ada pencairan Banpol, Sumi bersama pengurus PDI Perjuangan Sidoarjo terus melakukan kegiatan kepartaian. Konsolidasi internal partai juga tetap berjalan. Kegiatan Bulan Bung Karno selama Juni lalu juga lancar.

"Alhamdulillah, kegiatan partai tetap jalan," ungkap Sumi.

Sumi melanjutkan jika kegiatan DPC PDIP Sidoarjo cukup padat selama bulan Bung Karno ini. Pada 22 sampai 24 Juni, DPC berencana memberangkatkan pengurus partai maupun organisasi sayap partai ke Jakarta. Termasuk, para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan anggota satgas partai.

"Meski banpol belum turun, DPC PDIP tidak

akan berhenti melakukan konsolidasi. Semua program dan kegiatan harus tetap jalan. Sukarelawan, pengurus, maupun anggota Fraksi PDIP di DPRD Sidoarjo menopang kegiatan partai. Kami gotong royong. Urunan teman-teman pengurus dan anggota fraksi. Sukarela," ungkap Sumi.

Hal senada juga diungkapkan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Sujayadi menegaskan jika Partai Gerindra sudah lakukan konsolidasi kepada Fraksi Gerindra di DPRD untuk melakukan komunikasi terkait Banpol kepada Bupati Sidoarjo untuk segera berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur terkait Banpol maupun kenaikan Banpol Partai Politik di Sidoarjo.

"Partai-partai sangat membutuhkan itu (banpol red) di tahun Politik Pemilu 2024. Banpol itu kan hak kami, hak Partai Politik menerimanya," kata Sujayadi.

Sujayadi menegaskan jika sejak kemarin-kemarin Partai Politik itu membutuhkan Banpol direalisasikan. Saat ini kami hanya bisa menunggu saja.

"Partai Gerindra Sidoarjo menyayangkan keterlambatan turunya Banpol dari Pemerintah Daerah ke Partai Politik di Sidoarjo," sesalnya.

"Tetapi meski Banpol belum dicairkan, Partai Ger-

indra Sidoarjo sudah mengantisipasi hal itu dengan mengatur anggaran Partai yang teratur di pengurus DPC Partai Gerindra Sidoarjo," sambung Sujayadi.

Sementara terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan mengatakan, tidak ada masalah dalam rencana pencairan dana Banpol Partai Politik di Sidoarjo.

"Kami (Bakesbangred) telah mengajukan pencairan dana hibah tersebut ke Gubernur Jatim. Sudah sekitar 1 bulan pengajuan diajukan, saat ini tinggal menunggu persetujuan," ungkap Mustain.

Diketahui, Dana hibah banpol 2023 ini mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Nilai masing-masing banpol ditentukan oleh jumlah suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Berikut rinciannya: PKB sebesar Rp 3,087 miliar (16 kursi), PDI Perjuangan Rp 1,883 Miliar (9 kursi), Gerindra Rp 1,571 miliar (7 kursi) dan PAN Rp 838,6 juta (5 kursi).

Kemudian PKS mendapatkan Rp 742 juta (4 kursi), Partai Golkar Rp 730 juta (4 kursi), Demokrat Rp 551 Juta (2 kursi), Nasdem Rp 368 juta (4 kursi) dan terakhir PPP yang punya 1 kursi di DPRD Sidoarjo menerima Rp 290 juta. (bud/di)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Mengenal Lebih Dekat Penemu Formula Eco-Lindi asal Sidoarjo

Rania Sukses Taklukkan Bau Busuk TPA Benowo Surabaya

Sidoarjo, Memo X

Rania Naura Anindhita Amiq selama ini hanya dikenal sebagai mahasiswi asal Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Namun dibalik kepiawaiannya Rania sapaan akrab mahasiswi cantik ini, dia mampu menaklukkan bau busuk menyengat yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya.

Lokasinya berdekatan dengan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Rania memanfaatkan temuannya Eco-Lindi untuk menghilangkan bau busuk yang selama ini menjadi hantu warga sekitar TPA Benowo.

Bahkan kini, Rania yang tidak lain adalah putri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo ini mulai mendaftarkan hak paten atas temuannya itu. Apalagi,

■ Baca SUKSES Hal 11



memo X

SUKSES

SAMBUNGAN hal 1...

Eco-Lindi ini dikenal sebagai cairan tanpa campuran bahan kimia sama sekali. Namun dalam menghilangkan bau tak sedap cukup efektif dan tidak membutuhkan waktu lama.

"Konsepnya sederhana yakni cairan ini bisa menghilangkan bau tak sedap tumpukan sampah tanpa campuran bahan kimia. Sekaligus bisa menetralkan air lindi agar tidak lagi menjadi sumber polusi udara dengan bau tak sedap itu," ujar Rania Naura Anindhita Amiq kepada Memo X, Rabu (21/06/2023).

Saat ini, Rania tercatat masih sebagai mahasiswa Semester 8 Jurusan Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Rania merupakan mahasiswi asal Sidoarjo sekaligus alumni SMAN 1 Sidoarjo.

"Uji cobanya memang di TPA Jabon karena selama ini dikeluhkan warga soal bau tak sedapnya. Tapi, kemarin akhir 2022 sudah berhasil menghilangkan

bau tak sedap di TPA Benowo karena berdekatan dengan Stadion GBT yang hendak digukana Piala Dunia U 20. Kami pun siap membantu menghilangkan bau tak sedap yang kerap kali sampai ke Stadion GBT itu," ungkap Rania.

Bahkan ironisnya selama ini TPA Benowo tidak hanya berdekatan dengan Stadion GBT akan tetapi juga berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Gresik. Bahkan sampah di TPA Benowo yang sudah seperti perbukitan di tengah area kawasan tambak itu sudah dikenal mengeluarkan bau tak sedap. Tetapi kini sudah hilang bau tak sedap itu

"Kita mau menghilangkan bau busuk apa saja tetap bisa dengan cairan Eco-Lindi ini karena prakteknya mudah tinggal disemprotkan begitu saja dan bisa ditunggu reaksi dan hasilnya," tegasnya.

Rania menguraikan dirinya menemukan formula dan ramuan penghilang bau busuk itu dengan memanfaatkan air sampah yang dikenal dengan sebutan air lindi. Selama ini air lindi yang hitam pekat bukan hanya menimbulkan bau busuk. Tetapi juga menjadi racun yang bisa merusak lingkungan sekitar.

"Dari air lindi itu yang diteliti. Air lindi sudah bukan lagi air karena sudah berubah menjadi alkalin. Bahkan tidak lagi mengandung oksigen dan karbon karena sudah diurai. Bahan pengurai ini harus yang banyak mengandung sukrosa dan fruktosa. Bahan seperti itu bisa jadi substrat bagi mikroba yang ada di air lindi itu. Meski seperti ilmu kimia biasa tetapi saya berusaha meneliti ini agar persoalan bau sampah yang dikeluarkan warga selama ini ada solusi nyatanya," paparnya.

Rania yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara putra M Bahrul Amiq ini mencontohkan. Setiap orang selesai makan durian diajari agar mencuci tangan dengan air yang dituang ke cekungan bekas buah durian

menempel. Dengan begitu maka bau menyengat durian yang ada di tangan pun akan hilang seketika. Begitu juga dengan yang menempel di jari jemari tangan.

"Nah menghilangkan bau durian bisa dari getah durian. Karena itu apa yang dihasilkan sampah saya yakin bisa menghilangkan bau tak sedap tumpukan sampah itu sendiri. Saat air lindi dibawa kami berhasil menemukan bahan pengurainya sehingga jadinya Eco-Lindi itu," jelasnya.

Sementara Eco-Lindi ini yang diajukan hak patennya. Pemkab Sidoarjo juga sudah memanfaatkan untuk bau tak sedap di TPA Jabon. Bahkan di TPA Jabon itulah Rania kali pertama melakukan penelitian hingga menemukan formula Eco-Lindi ini.

"Saya akan terus penemuan ini agar Eco-Lindi tidak hanya menjadi penghilang bau busuk kandang ayam, kandang kambing dan bau apa pun. Tapi juga bisa menjadikan Eco-Lindi sebagai pupuk organik," pungkasnya. (par/wan/red)

memo X

KPPN Gelar Mini Expo

Sinergi Kemenkeu Mendukung UMKM di Sidoarjo

SIDOARJO - Bertempat di Aula lantai II KPPN Sidoarjo menggelar kegiatan mini expo UMKM Rabu (21/6/23). Kegiatan bersama satuan kerja (Satker) pengelola APBN yang juga mengundang unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai narasumber. Diantaranya perbankan yang meliputi dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan BSI serta dari 9 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan binaan dari KPPN Sidoarjo.

Didi Prihadi Wibowo (Kepala KPPN Sidoarjo) kepada duta.co mengatakan, kegiatan yang dikemas dalam mini expo KPPN Sidoarjo yang bertemakan UMKM Kuat Indonesia Sejahtera ini bertujuan untuk terus menerus mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan / pengelola keuangan untuk dapat seoptimal mungkin mendukung UMKM dalam setiap berkegiatan, dan dalam melakukan penyediaan barang / jasa yang diperlukan.

"Pada kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan familiarisasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara yang saat ini tengah pesat dikembangkan, yang meliputi digipay, penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan tagihan kepada negara, dan elektronisasi dalam penghentian pembayaran gaji pegawai yang pindah atau pensiun," papar Didi.

Didi melanjutkan, pengenalan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berupa isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan UMKM. Serta dari perbankan memperkenalkan sistem baru dalam pengelolaan keuangan di masing-masing perbankan.

"Digipay sendiri merupakan sistem baru dalam pengelolaan belanja negara yang dapat digunakan oleh satuan



KPPN Sidoarjo sosialisasi SAKTI dan digitalisasi pengelolaan keuangan dan mini expo UMKM Rabu (21/6/23). LOETFI/DUTA

kerja dan UMKM yang dapat terhubung dalam marketplace dan terkoneksi pada sistem perbankan," terang Didi Rabu (21/6/23).

"Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat sebagai pendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 5,3%. Tujuan pertama mengajak kepada satker untuk membelanjakan keuangan yang dapat mengembangkan kegiatan UMKM. Perlu diketahui kegiatan ini sudah yang kedua kalinya mas," pungkaskan Didi Prihadi.

Salah satu Stakeholder KPPN, M. Zahirul Haq selaku Branch Manager (BM) BSI Cabang Sidoarjo A. Yani menyampaikan, pertama saya sampaikan bahwa bank BSI adalah salah satu mitra KPPN Sidoarjo.

"Terkait dengan UMKM ini, karena bank BSI adalah penyalur kredit rakyat yang dari syaria'ah, kami juga mempunyai banyak binaan nasabah - nasabah UMKM, sehingga di acara pagi ini kita juga hadir bersama, sesuai dengan undangan Pak Didi selaku Kepala KPPN

Sidoarjo," terang M. Zahirul.

Zahirul menambahkan, kami juga membawa beberapa produk dari UMKM yang sudah kami support modal usahanya dari bank BSI, sehingga produknya bisa kami bawa ke sini. Harapannya kami dari bank syariah siap untuk berkolaborasi dengan KPPN untuk bisa mengembangkan UMKM di Sidoarjo, ujarnya.

Senada P'in Sojuscha Vinantie (Kepala Seksi Bank) KPPN Cabang Sidoarjo menambahkan, dengan kegiatan ini mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. KPPN ikut partisipasi dalam pemberdayaan UMKM secara rutin dalam setiap kegiatan.

"Acara mini expo UMKM juga mengandeng dari perbankan, instansi yang terlibat dalam pemberian KUR dan sebagai mitra pencairan belanja pemerintah yang bersumber dari APBN maupun Transfer ke Daerah. Harapannya dengan kegiatan ini memperkenalkan UMKM dan mendorong ekonomi masyarakat (kerakyatan)," imbuh P'in. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Waspada, Katarak Sebabkan Kebutaan Terbesar di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Penanggung jawab Klinik Mata KMU Sidoarjo, dr. Miftahur Rochmah, SpM, mohon kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo bisa waspada dengan penyakit mata katarak. Sebab, penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan terbesar yang harus diwaspadai.

“Di Kabupaten Sidoarjo, penyakit mata katarak merupakan penyebab kebutaan terbesar yang harus diwaspadai,” jelas dr Miftah, Senin (20/6) kemarin.

Dirinya sempat menyampaikan kalau Bulan Juni adalah bulan yang diperingati sebagai bulan kesadaran untuk penyakit katarak di dunia atau disebut sebagai Cataract Awareness Month. Menurutnya ini bisa dijadikan sebagai suatu momen yang tepat dalam mewujudkan misi pemberantasan kebutaan.

“Inisiasi ini harus digalakkan, karena fakta, bahwa penyakit katarak ini sungguh mencengangkan dan membutuhkan penanganan khusus,” kata salah satu dokter mata yang bertugas di RSUD Sidoarjo ini.

Dirinya menyampaikan di Klinik Mata KMU Sidoarjo, para petugas kesehatan beserta dokter spesialis mata memberikan edukasi tentang katarak kepada masyarakat. Termasuk melakukan cek gula darah acak (GDA) dan skrining katarak.

Tidak hanya masyarakat Sidoarjo, tapi juga seluruh masyarakat di dunia, ia berharap bisa lebih peduli dengan katarak. Mengingat, katarak ini adalah kasus yang paling banyak menyebabkan kebutaan di dunia, termasuk di Sidoarjo.

Dari catatannya, pada tahun 2022 lalu, tercatat 822 kasus katarak di KMU Sidoarjo, dan hingga 2023 ini sudah ada 313 orang menderita katarak.

Di tingkat nasional, berdasar data dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 lalu, penyebab kebutaan terbesar di Indonesia adalah Katarak. Sebesar 34, 47% penderita katarak mengalami kebutaan, kemudian disusul oleh Glaukoma.

“Di KMU Sidoarjo, pasien terbanyak yang kami layani memang pasien katarak,” katanya. [kus.gat]

HARIAN
Bhirawa
Maka Hidup Kita Hidup



BAHAYA: Lokasi ditemukannya 16 peluru dan sejumlah proyektil di Perumahan Posona Permata Ungu Desa Tempel, Kecamatan Krian.

27 Perumahan Ajukan Penyerahan PSU ke Pemkab

KOTA-Proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) milik perumahan kepada Pemkab Sidoarjo terus dilakukan. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo mendorong perumahan yang belum menyerahkan untuk segera mengajukan.

Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo Bachruni Aryawan mengungkapkan bahwa belum semua perumahan di wilayah tersebut telah menyerahkan PSU. Hingga saat ini, hanya 103 perumahan yang telah menyerahkan PSU, sementara 27 perumahan masih dalam proses pengajuan.

Bachruni mengapresiasi sikap para perusahaan yang telah secara sukarela menyerahkan PSU yang memang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan pengembang. Sebab penyerahan itu nantinya akan bermanfaat untuk kenyamanan warga atau penghuni perumahan.

"Jangan sampai ada keluhan dari penghuni yang mengeluhkan jalan rusak, drainase rusak, dan tidak segera diperbaiki," katanya.

● Ke Halaman 10

27 Perumahan Ajukan...

Dia menjelaskan, setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan yang bakal dibangun untuk dijadikan fasos maupun fasum. Kewajiban itu melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. Karenanya, jika sudah dibangun, maka PSU wajib untuk segera diserahkan kepada Pemkab agar nantinya dapat dikelola lebih lanjut. Bentuknya bisa berupa Ruang Terbuka Hijau, sarana, jalan, drainase, dan PJU.

Menurut dia, dengan adanya penye-

rahan PSU dari pengembang ke Pemkab Sidoarjo, nantinya ada anggaran dari provinsi, kabupaten dan dana desa yang bisa membantu dalam program pembangunan di kawasan perumahan. Dengan begitu, pihak pengembang perumahan tak lagi memikirkan bagaimana memelihara dan membangun fasos dan fasum.

Untuk mendorong penyerahan PSU, Bachruni menyebut pihaknya melakukan beberapa langkah. Seperti memberikan teguran dan imbauan kepada semua pengembang.

"Kemudian melakukan pendataan dan sosialisasi kepada perumahan yang belum menyerahkan," imbuhnya.

Bachruni menyebutkan, pengelolaan dan penataan PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan dan kawasan permukiman. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Candi Pandan Kedung Keras, Situs yang Baru Ditemukan

SIDOARJO - Candi Pandan Kedung Keras di Desa Tulangan Timur, Tulangan, merupakan candi termuda lantaran baru ditemukan. Karena itu, candi tersebut masih tergolong objek diduga cagar budaya (ODCB).

Pamong Budaya Ahli Pertama UPT Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Vidi Susanto mengatakan bahwa candi tersebut masih diekskavasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

"Ditemukan pada 2022 oleh warga dan sempat kami tinjau, lalu survei juga, digali tahun lalu," ungkapnya. Kemudian, baru sejak Senin (19/6) ekskavasi dilakukan untuk melihat struktur candi.

Hal tersebut terbilang penting untuk mengetahui jenis candi dan berasal dari masa apa. Candi yang memiliki luas sekitar 25 meter persegi itu berada tepat di kompleks pemakaman umum belakang perumahan.

Dari hasil survei dan ekskavasi, ditemukan sebuah sumur atau lubang sedalam kurang lebih 2,5 meter. Lubang tersebut memang selalu

Jawa Pos

ada di setiap candi. Biasanya sumur itu digunakan untuk meletakkan persembahan dan dipercaya sebagai tempat roh leluhur.

Saat menggali, warga dan tim dari UPT BPK menemukan patung kura-kura selebar telapak tangan orang dewasa yang berlapis emas. "Saat ini sudah kami serahkan ke pemdes," ungkapnya.

Mengenai dari masa apa, Vidi menduga bahwa dari kewilayahan, diketahui candi tersebut berasal dari Kerajaan Majapahit. "Karena Tulangan sendiri, prasasti Canggal menuliskan adanya nama daerah ini," ujarnya.

Dengan begitu, ada kemungkinan candi tersebut berasal dari masa Majapahit. Namun, hal itu sebatas dugaan yang perlu dikaji lagi. Ekskavasi Candi Pandan Kedung Keras akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. (eza/c7/any)



AHMAD RIZAL/JAWA POS

OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA: Proses ekskavasi Candi Pandan Kedung Keras di Tulangan yang diduga bagian dari kejayaan Kerajaan Majapahit.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

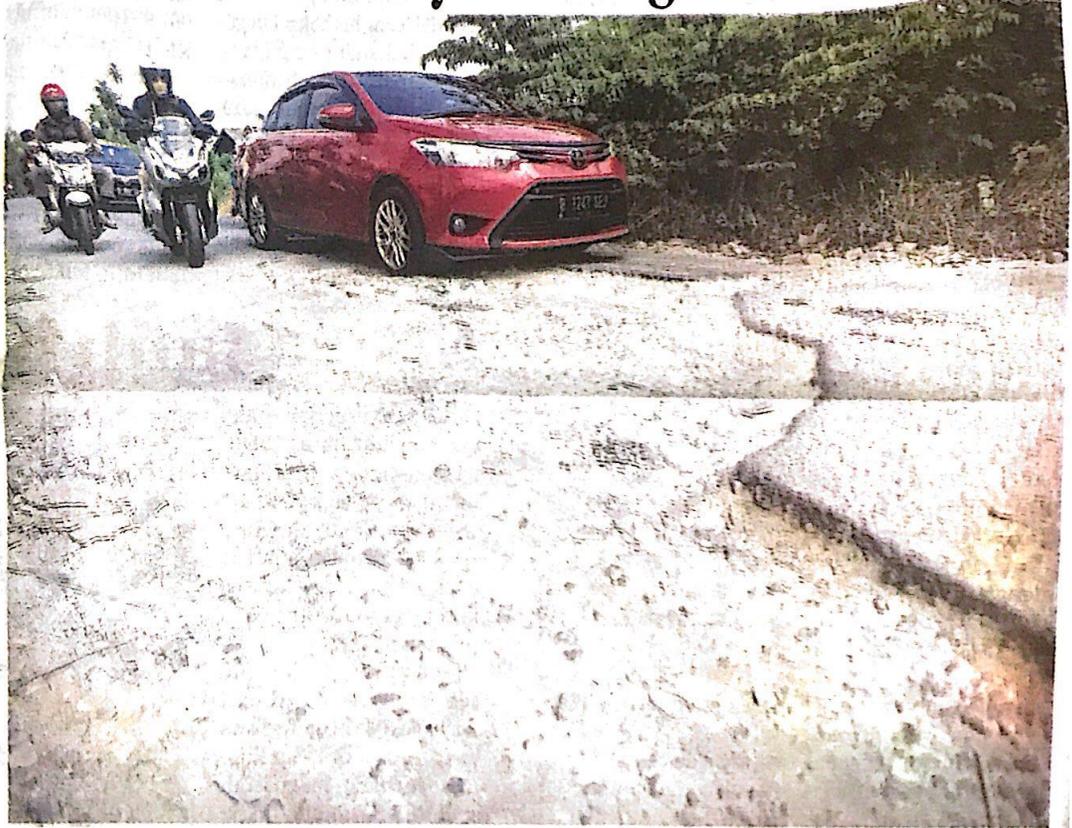
Kerap Jadi Alternatif, Jalan Swadaya Masangan Wetan Rusak

SIDOARJO – Jalan swadaya di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, rusak sekitar 1 kilometer. Jalan alternatif penghubung Desa Masangan Wetan dengan Desa Geluran, Kecamatan Taman, itu penuh lubang. Tahun depan, jalan tersebut rencananya dibeton.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi kerusakan jalan tersebut. "Rencananya tahun depan kami beton," ujar Dwi kemarin (21/6). Drainase jalan juga segera dibangun. Sebab, jalan tersebut belum memiliki drainase.

Solusi sementara, pihaknya bakal melakukan pemeliharaan jalan di sana agar kerusakan tidak semakin parah dan tidak membahayakan. Pemeliharaan dilakukan sesuai kondisi jalan yang rusak. Berapa pun panjangnya, jalan itu akan diperbaiki.

Muh. Moko, salah seorang warga, mengatakan bahwa jalan tersebut rusak karena lama tidak tersentuh perbaikan. Baik sekadar pengurukan maupun penambalan. "Karena ini jalan alternatif, agak kecil, ada yang melewati sawah juga. Seharusnya tetap diperbaiki, jangan sampai parah," katanya.



TIDAK KUNJUNG DIPERBAIKI: Pengendara melintas di jalan swadaya yang rusak di Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, kemarin.

Meskipun lebar jalan hanya sekitar 6 meter, banyak kendaraan yang melintas di sana. "Pagi mesti padat

karena banyak warga yang bekerja di Surabaya juga lewat sini," tuturnya. Jalan tersebut menjadi alternatif

warga Sukodono yang akan menuju Geluran, Kecamatan Taman, hingga ke Surabaya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hibah Blangko E-KTP Jadi Perhatian Penting DPRD-Pemkab Sidoarjo.

By Admin — On Jun 22, 2023

BERITA NASIONAL



Share



0

Aksaratimes.com | 21-juni-2023 Sidoarjo-Pemilu semakin dekat. Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo segera menyiapkan dana hibah untuk pengadaan blangko KTP elektronik (e-KTP). E-KTP menjadi salah satu dokumen penting bagi pemilih saat mencoblos. Tidak ada kepastian blangko dari pemerintah pusat.

Desakan fraksi-fraksi itu telah disampaikan dalam pandangan umum (PU) pada rapat paripurna pekan lalu. Di antaranya, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra lewat juru bicara Ketua Fraksi Gerindra Anang Siswandoko.

Senin (19/6/2023) desakan itu dijawab oleh Wakil Bupati Subandi dalam rapat paripurna tentang pertanggungjawaban keuangan APBD 2022 di gedung DPRD. "Hibah blangko e-KTP, akan dipertimbangkan dengan kondisi keuangan," kata Subandi yang juga menjawab isi lain PU dari fraksi-fraksi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo Redi Kusuma menjelaskan, kebutuhan cetak e-KTP yang belum terpenuhi mencapai sekitar 13 ribu keping.



Setiap pekan, permintaan cetak sekitar 2 ribu keping. Namun, pengiriman blangko dari pusat tidak pasti. Tidak tentu berapa jumlahnya.

Selama Januari sampai Juni 2023, dispendukcapil telah mencetak sekitar 60 ribu keping e-KTP. Kebutuhan Juli sampai Desember diperkirakan mencapai 70 ribu keping lagi. Tidak ada kepastian apakah blangko akan siap atau tidak.

Berapa kebutuhan dana hibah untuk blangko e-KTP ini? Redi memperkirakan, biaya pengadaan satu keping blangko e-KTP sekitar Rp 10.182. Tinggal mengalikan saja Rp 10.182 x 70 ribu keping. Diperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 700 juta.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat karena masuk daftar antrean. Memang ini merupakan wewenang pusat," jelasnya.....(Ali)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sosialisasi SAKTI untuk mendukung kegiatan UMKM Sidoarjo (Tama)

HEADLINE

Sinergi Kemenkeu dukung UMKM Sidoarjo kuat sejahtera

andiono Hernawan, 15 hours ago | 2 min read | 522

LENSAINDONESIA.COM: Sinergi bareng satuan kerja pengelolaan APBN, KPPN Sidoarjo gelar kegiatan dikemas dalam mini expo bertemakan UMKM Kuat Indonesia Sejahtera, di lantai II KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), Rabu (21/6/2023).

 lensaindonesia.com

Mini expo ini dihadiri unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai narasumber, ada juga pihak perbankan dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan BSI serta dari 9 UMKM binaan KPPN Sidoarjo.

Kepala KPPN Sidoarjo Didi Prihadi Wibowo kepada lensaindonesia.com, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan atau pengelola keuangan, seoptimal mungkin mendukung UMKM.

"Kegiatan ini juga diisi sosialisasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan familiarisasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara yang saat ini tengah pesat dikembangkan. Di antaranya digipay, penggunaan tanda tangan elektronik dalam pengajuan tagihan kepada negara, dan elektronisasi dalam penghentian pembayaran gaji untuk pegawai yang pindah atau pensiun," jelasnya.

"Juga ada pengenalan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berupa isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan UMKM, serta dari perbankan memperkenalkan sistem baru dalam pengelolaan keuangan di masing-masing perbankan," imbuhnya.

Digipay sendiri merupakan sistem baru dalam pengelolaan belanja negara yang dapat digunakan satuan kerja dan UMKM. Program ini terhubung dalam marketplace dan terkoneksi pada sistem perbankan.

Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat sebagai pendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 5,3 %.

Di tempat yang sama M Zahirul Haq selaku Branch Manager BSI cabang Sidoarjo menjelaskan pihaknya merupakan salah satu mitra KPPN Sidoarjo. "BSI adalah penyalur kredit rakyat yang dari syariah. Kami juga mempunyai banyak binaan nasabah-nasabah UMKM. Kami juga membawa beberapa produk dari UMKM yang sudah kami support modal usahanya. Semoga apa yang kami lakukan bisa mengembangkan UMKM di Sidoarjo," pungkasnya. @tama